

REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA INDONESIA

Wahyudi

Universitas Sebelas Maret
e-mail: wahyudi@fkip.uns.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menyajikan kembali pemikiran tentang Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia menghadapi masa depan, terutama tentang Apa, Mengapa, dan Bagaimana Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Metode yang digunakan pada kajian ini adalah metode analisis kritis literatur berdasarkan fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Materi yang dibahas pada kajian ini adalah tentang hakikat pembangunan Karakter, Apa, Mengapa, dan Bagaimana reaktualisasi nilai-nilai Pancasila itu dikembangkan lagi dalam rangka pembangunan karakter bangsa Indonesia. Hasil dari kajian ini adalah Indonesia memiliki ciri khas tentang dasar Negara, pandangan hidup bangsa, maka pendekatan yang tepat untuk pembangunan karakter bangsa yaitu menggunakan “Pendekatan Pancasila” secara konsisten. Adapun ranah dan sasaran dari aktualisasi sila-sila dalam Pancasila adalah “Pembangunan Karakter”, yang mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotor. Pengembangan model penafsiran nilai-nilai Pancasila bersifatterbuka (konsekuensi Pancasila sebagai ideologi-terbuka). Pendekatan untuk memahami, menghayati, dan menerapkannya adalah pendekatan-kemanusiaan melalui budaya-dialog. Metodenya melalui pendidikan, yaitu dialog-budaya, komunikasi, diskusi interaktif, koordinasi, regulasi, dan keteladanan yang disertai dengan penerapan teknik-teknik ‘*reward and punishment*’, simulasi (bermain-peran), dinamika kelompok, analisis-kasus, dan seterusnya. Sasaran implementasi nilai-nilai Pancasila adalah individu, keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara dengan prioritas kepada praktisi, ilmuwan/akademisi, ormas/orpol, pemimpin nasional/daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

Kata Kunci: *Nilai-nilai Pancasila, Karakter Bangsa*

PENDAHULUAN

Pada bagian ini diawali dengan sebuah Renungan dan Refleksi tentang Pancasila sebagai berikut:

Kita sungguh sedih menyaksikan berbagai aksi brutal dan kanibal yang tak pernah berhenti menggoyang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku kekerasan berbasiskan primordialisme sempit dan SARA di negeri multikultur ini seolah-olah telah menjadi budaya yang mengakar dan memfosil dalam ruang memori dan batin anak-anak bangsa. Aksi bakar-bakaran, perusakan, penganiayaan, dan berbagai perilaku vulgar lainnya seolah-olah sudah menjadi tontonan tragis dan menyayat di atas panggung kehidupan sosial masyarakat kita. Nyawa, darah, dan air mata, seolah-olah begitu gampang tergadaikan hanya untuk memuaskan naluri dan budaya agresivitas berdalih gengsi dan harga diri kelompok. Bangsa kita yang dulu dimuliakan dan diagungkan sebagai bangsa yang ramah, santun, dan beradab, telah menjelma menjadi bangsa pemarah, pemfitnah, dan biadab.

Sudah tak ada lagikah ruang bagi ideologi dan pandangan hidup bangsa, Pancasila, bersemayam dan mengakar dalam relung kepribadian bangsa kita? Sudah demikian rendahkan penafsiran dan apresiasi kita terhadap nilai-nilai kearifan dan fatsoen kehidupan yang telah diwariskan oleh para “founding fathers” kita, hingga kita demikian gampang dibakar emosi dan amarah hanya oleh perkara-perkara sepele yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat?

Kita memang tak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar ketika selubung kekerasan itu sudah demikian kuat menelikung keseharian kita. Kita juga tak perlu mencari kambing hitam, siapa sejatinya yang telah membuat dinamika 12 tahun reformasi mengalami stagnasi dan set-back. Kita juga tak pantas lagi berkeluh kesah, kenapa bangsa yang besar dan agung ini bukannya makin matang dan dewasa dalam menemukan makna kearifan hidup, tetapi justru kian tenggelam dalam perilaku konyol dan biadab. Namun, tak ada salahnya kalau kita bertanya-tanya, sudah hilangkah roh Pancasila itu dari tubuh negeri ini?

(Sumber: <http://sawali.info/2010/06/01/nilai-nilai-pancasila-riwayatmu/#ixzz0zc5tjhfP>)

Berdasarkan renungan di atas, maka kiranya kita perlu merefleksi diri sebagai bangsa yang memiliki Pancasila sebagai jati diri, pandangan hidup, dasar negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjangkehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu, sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam *ideologi tengah* di antara dua ideologi besar duniayang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila

bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukanperpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro Liberalisme. Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini berartilah haluan politik negara dirubah. Pendulum yang posisinya di samping kanan digeser dan digerakan ke kiri. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri (PKI) Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan pro ke Kiri dengan dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta-Pyongyang. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangannya pemerintahan Orde Lama (Ir. Soekarno) dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru (Jenderal Suharto). Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh regim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi Kiri dan anti Barat menariknya keposisi Kanan. Namun rezim Orde Baru pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945, Ia dianggap cenderung ke praktik Liberalisme-kapitalistik dalam mengelola negara. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangannya rezim Orde Baru, maka muncul rezim Pemerintahan Reformasi sampai saat ini. Pemerintahan-pemerintahan rezim Reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktek bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru. Tetapi sampai saat ini ternyata impian tersebut belum bisa terwujud, bahkan kadang terasa mundur. Yang lebih ironis lagi, saat ini tidak lagi kita dengarkan, kita lihat, dan kita rasakan butir-butir pengamalan Pancasila yang selama ini menjadi dasar Negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia. Dimanakah Pancasila kita sekarang ini? Untuk itu, makalah ini bertujuan untuk menyajikan kembali pemikiran tentang Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia menghadapi masa depan, terutama tentang Apa, Mengapa, dan Bagaimana Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan awali dengan pembahasan hakikat pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya akan dibahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia.

A. Hakikat Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Sumber: Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025). Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.”

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Pendidikan karakter berfungsi (1) membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural; (2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan ummat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yaitu keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media massa.

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18)

Tanggung Jawab (Sumber: Pusat Kurikulum. *Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*. 2009:9-10). Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, psikomotorik) dan fungsi totalitas sosiokultural pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat (Kemendiknas, 2011: 5 – 8).

B. Apa dan Mengapa Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Yang dimaksud dengan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, meralisasikan, mengejawantahkan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia saat ini berada di tengah-tengah perkembangan dunia yang serba modern, berteknologi canggih, dan era globalisasi di segala aspek kehidupan manusia yang mencakup aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah meliputi: posisi dan lokasi, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk Indonesia (Sikayamampu) dan aspek sosial yang meliputi aspek: ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

Secara pertimbangan politik, Pancasila perlu diaktualisasikan kembali (reaktualisasi) dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan mengingat Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan visi kebangsaan Indonesia (yang membina persatuan bangsa) yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia. Visi kebangsaan dan sumber demokrasi Indonesia ini perlu diterapkan sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan etika untuk melandasi dan mengawal perubahan politik dan pemerintahan yang sedang terjadi dari model sentralistik (otoriter yang birokratis dan *executive-heavy*) menuju model desentralistik (demokrasi yang multipartai dan *legislative-heavy*). Latar belakang seperti itu didorong pula oleh realita penerapan Pancasila selama ini yang dipersepsi publik sebagai alat untuk kepentingan penguasa, yang ditantang oleh globalisasi ideologi asing (terutama Liberalisme), yang gagal dalam mengatasi penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai akibat adanya salah-urus mengelola negara, serta perwujudan praktek demokrasinya berkonotasi buruk. Ini semua seringkali diarahkan pada Pancasila yang dijadikan ‘kambinghitam’-nya.

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar-negara NKRI yang dirumuskan dalam (Pembukaan) UUD 1945 dan yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan walaupun konstitusinya berubah. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada ‘*reinventing and rebuilding*’ Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandaskan Pancasila dasar negara. Melalui UUD 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan kembali agar dalam praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif .

Dimensi pertahanan dan keamanan memandang bahwa keberadaan Pancasila erat kaitannya dengan sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga pelaksanaan

Pancasila secara murni dan konsekuen merupakan landasan idiil dan konstitusional bagi ketahanan nasional serta merupakan filter untuk tantangan liberalisme-kapitalisme di Indonesia yang semakin menguat. Pancasila perlu diaktualisasikan kembali oleh dan bagi bangsa Indonesia karena banyaknya dampak negative kebijakan otonomi daerah (seperti timbul ego daerah, primordialisme sempit) sebagai akibat dari sempitnya pemahaman Pancasila, terjadinya degradasi nilai-nilai kekeluargaan dan tenggang-rasa di masyarakat, serta disalahgunakan implementasinya oleh penguasa sehingga legitimasinya sudah pada titik nadir (antiklimaks).

Dimensi sosial ekonomi memandang perlunya diaktualisasikan oleh dan bagi bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai falsafah negara yang mewujudkan sistem ekonomi Pancasila serta sebagai sumber sistem ekonomi kerakyatan. Pandangan ini diperkuat oleh realita tentang keadaan negara yang labil yang telah berdampak pada efektifnya pengaruh globalisasi terhadap penguatan campurtangan asing (badan-badan internasional) terhadap perekonomian nasional.

Begitu pula dimensi kesejahteraan rakyat yang memandang perlunya Pancasila diaktualisasikan kembali oleh dan bagi bangsa Indonesia karena kemampuan ideologi Pancasila yang bersimetris dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan kedaulatan rakyat serta yang perlu dianalisis substansi ideologinya pada segi ontologi dan epistemologinya. Di samping itu, didorong pula oleh realita tentang bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis-diri (dekadensi moral), krisis kepercayaan, mengalami gangguan (disrupsi) toleransi, masih memiliki kelemahan filsafat-ilmiahnya, serta belum merasakan terpenuhinya harapan bangsa atau lemah aktualisasinya dalam usaha kecil, menengah, dan mikro-pedesaan.

Dimensi lingkungan hidup memandang perlunya diaktualisasikan oleh dan bagi bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia. Untuk itu maka diperlukan pedomannya untuk menghayati nilai-nilai Pancasila serta untuk mengejawantahkan Pancasila yang diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan dengan lingkungan hidup (Sumber Daya Alam/SDA). Demikian pula hal itu diperlukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional serta untuk memperbaiki dampak dari eksploitasi SDA dan lingkungan hidup terutama pada sektor-sektor strategisnya (kehutanan, pertanian, dan pertambangan).

Dimensi pendidikan memandang Pancasila perlu diaktualisasikan kembali dengan alasan bahwa ia perlu difahami, dihayati dan diamalkan kembali oleh seluruh komponen bangsa. Sehubungan dengan ini, anak sebagai harapan bangsa dan generasi penerus sudah seharusnya menyerap nilai-nilai Pancasila sejak dini dengan cara diasah, diasih, dan diasuh. Di samping itu, dalam realita kehidupan sehari-hari selama ini, Pancasila telah dijadikan alat-penguasa untuk melegitimasi perilaku yang menyimpang yang tidak mendidik, dihilangkannya Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Pancasila dalam kurikulum nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), hancurnya pembangunan karena moral yang serakah dibiarkan merajalela, serta menguatnya desakan konsumerisme untuk membeli gengsi (kehidupan semu).

Dimensi budaya memandang perlunya Pancasila diaktualisasikan kembali (dikinikkan) oleh dan bagi bangsa Indonesia dengan pertimbangan perlunya visi NKRI 2020 untuk menjadi negara Industri Maju Baru. Dengan demikian rumusan Pancasila pada Pembukaan UUD 1945 tak perlu dipermasalahkan lagi tetapi justru diperlukan pengembangan budaya Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (kreatif, berbudi, berdaya, perdamaian, dll). Hal ini dianggap penting mengingat sejak reformasi, persatuan dan kesatuan menjadi tidak kokoh serta kondisi bangsa yang masih menghadapi tingkat kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Terakhir, dimensi keagamaan memandang perlunya Pancasila diaktualisasikan kembali oleh dan bagi bangsa Indonesia, mengingat keragaman agama perlu disikapi sebagai permata-indah untuk dipilih. Hal ini sebagai pewujudan terhadap hasil penelusuran sejarah perumusannya. Di samping itu, Pancasila dan Agama serta nilai-nilai lainnya telah membentuk ideologi Pancasila yang bila dijaga dan diimplementasikan dengan baik dan benar maka negara akan tegak dan kokoh.

Pertimbangan lainnya adalah karena selama ini terkesan masyarakat telah trauma bila diajak bicara Pancasila karena dianggap Orde Baru. Selain itu, pada pengalaman telah diimplementasikan secara indoktrinatif melalui P-4, yang dalam prakteknya justru Pancasila yang seharusnya berfungsi sebagai perekat bangsa mulai diabaikan, sehingga ada fenomena untuk mendirikan negara dengan prinsip Islam atau dengan ideologi-alternatif lainnya sehingga memicu konflik yang mengatasnamakan agama, etnis, bahkan separatisme yang mengancam NKRI.

C. Bagaimana Re-Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Untuk dapat mengimplementasikan dan mengaktualisasikan sila-sila Pancasila dengan baik, maka perlu dimaklumi tentang kondisi bangsa dan Negara Indonesia saat ini. Posisi Indonesia di tengah-tengah perkembangan dunia dan globalisasi berada pada posisi “Silang”, baik secara geografis, geopolitik, maupun geostrategis, historis, maupun dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian diperlukan pendekatan/metode yang tepat. Karena bangsa Indonesia memiliki ciri khas tentang dasar Negara, pandangan hidup bangsa, maka pendekatan yang tepat yaitu menggunakan “Pendekatan Pancasila”. Yang dimaksud dengan Pendekatan Pancasila adalah cara berfikir, bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari lingkungan keluarga, masyarakat, dan kenegaraan harus selalu mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. Adapun ranah dan sasaran dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah “Pembangunan Karakter Bangsa”, yang mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotor. Karena termasuk pendidikan karakter, maka diperlukan model dan keteladanan. Hal ini seiring dengan perhatian pemerintah saat ini yang mendengungkan pentingnya pendidikan Karakter Bangsa Indonesia yang memiliki ciri khusus, yang tidak lain adalah Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila.

Uraian tentang reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan yang mencakup semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, yaitu meliputi aspek alamiah dan aspek sosial yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Posisi dan Lokasi Indonesia

Segala Kegiatan Pembangunan yang mencakup masalah penempatan, pemeliharaan dan pengembangan yang berkaitan dengan posisi dan lokasi keseluruhan wilayah Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan sila-sila Pancasila secara konsisten.

2. Bidang Kekayaan Alam

Pembangunan yang melibatkan kekayaan alam Indonesia yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan tentang pengadaan, pengolahan, pendayagunaan, dan pemanfaatan, pengembangan, serta pelestarian segala sumber daya alam Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten.

3. Bidang Kemampuan Penduduk

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi bangsa Indonesia sangat mendesak dan tidak bias ditawar lagi. Dengan pembangunan SDM yang tinggi akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat di mata dunia, sehingga menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Namun demikian dalam pembangunan SDM ini tetap mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten.

4. Bidang Ideologi

Pembangunan dalam rangka memperkuat dan mempertebal ideologi berbangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya Pancasila yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia.

5. Bidang Politik

Pendidikan dan pembangunan di bidang politik bagi bangsa Indonesia harus berlandaskan Pancasila, sehingga tidak dapat digantikan dengan landasan yang lain, termasuk paham barat dan timur. Untuk itu pendidikan dan pembangunan politik bagi bangsa Indonesia sangat penting, dan pelaksanaannya tetap mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten.

Pancasila dalam wujud sebagai (a) penyemangat persatuan dan kesadaran nasional (nasionalisme), yang harus dihayati dan diamalkan oleh penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warganegara, (b) tolok ukur eksistensi kelembagaan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya, (c) referensi dasar bagi sistem dan proses pemerintahan, yang prinsip-prinsipnya terejawantahkan dalam tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif, (d) alat pemersatu/perekat bangsa dan kebangsaan Indonesia, (e) objek kajian dari berbagai

sisi dan referensi-pendukung yang berlainan/beragam, (f) serta sebagai rujukan untuk kebijakan politik, pemerintahan, hukum, dan hankam.

Di samping itu, Pancasila sebagai dasar bagi segala pergerakan dan kemajuan bangsa, ruh yang bertahta kuat di dalam hati dan pikiran warganegara, ideologi yang menempatkan bangsa Indonesia sejajar dan berdampingan dengan bangsa/negara lainnya secara merdeka dan berdaulat, ideologi yang realistis, idealistis, dan fleksibel.

6. Bidang Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi harus selalu berakar dan bersumber pada Pancasila secara konsisten. Pembangunan di bidang ekonomi harus mewujudkan aktualisasi Pancasila dalam wujud sebagai nilai dan ruh bagi: (a) ekonomi-kerakyatan atas prinsip kebersamaan, keadilan, dan kemandirian, (b) sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme pasar, (c) ekonomi kerakyatan (agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil, (d) pemerintah yang memiliki asset produksi dalam jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak.

Di samping itu, Pancasila diaktualisasikan sebagai pendorong dan menjamin adanya tindakan nyata, yaitu (a) anak yatim dan fakir miskin dipelihara oleh negara, (b) setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, serta (c) tidak ada diskriminasi. Untuk ini perlu pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila yang rumusannya adalah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 (sebelum dirubah), sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).

Aktualisasinya dalam bidang lingkungan hidup, Pancasila diwujudkan sebagai ruh bagi perundang-undangan bidang sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan lingkungan hidup; yang (a) menegaskan bahwa kualitas lingkungan hidup sangat berkaitan dengan kualitas hidup, (b) yang berwawasan kebangsaan melalui pemeliharaan lingkungan hidup serta kesejahteraan seluruh rakyat secara adil, makmur, dan merata; serta (c) dipahami bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup beserta perilakunya.

7. Bidang Sosial Budaya

Pembangunan di bidang sosial budaya juga harus berakar dari kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Aktualisasinya tidak boleh menyimpang dari pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten.

Pembangunan di bidang ini merumus pada aktualisasi Pancasila dalam wujud sebagai landasan idiil bagi pembangunan pendidikan, budaya, dan keagamaan di Indonesia yang menghilangkan penonjolan kesukuan, keturunan, dan ras; ideologi terbuka yang mendorong kreativitas dan inovativitas; spirit untuk pengembangan dinamika masyarakat dalam membentuk watak peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; serta

visi dan misi pendidikan nasional bagi anak Indonesia. Problema yang dihadapi berintikan pada masalah kebudayaan, yang pemecahannya secara mendasar adalah melalui proses pendidikan secara menyeluruh.

Di bidang budaya, aktualisasi Pancasila berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya (keadaban) Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras-serasi-seimbang, serta kerakyatan; profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma/aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan; proses pembangunan budaya yang dibelajarkan/dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi; serta penguat kembali proses integrasi nasional baik secara vertical maupun horizontal.

Di bidang keagamaan, aktualisasi ini berwujud sebagai ideologi yang menerapkan prinsip agama apabila melaksanakan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, musyawarah, persamaan, toleransi, amar makruf dan nahi munkar, serta kritik interen. Di samping itu, Pancasila berwujud sebagai ideologi yang paling memungkinkan bangsa Indonesia bersatu dalam NKRI yang nilai-nilainya universal, yaitu yang sesuai dengan ‘lima tujuan hukum agama’: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, dan memelihara harta; filsafat dan ideologi yang tidak bertentangan dengan wawasan keagamaan; yang memelihara persatuan-umat, bukan penyatuan-umat; serta yang sebagai hasil kontrak-sosial budaya bangsa Indonesia.

8. Bidang Hankam

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan juga harus mewujudkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten.

Berdasarkan uraian di atas, maka saat ini diperlukan suatu langkah nyata secara nasional berupa suatu gerakan bersama untuk membudayakan dan mengembangkan karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya dengan melaksanakan “Gerakan Hidup Berkarakter Pancasila”.

D. Pemasarakatan dan Pembudayaan Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Untuk mewujudkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Simposium serta Seminar dan Lokakarya Pancasila merekomendasikan model, pendekatan, metode, teknik, sasaran (subjek dan objek), dan contoh untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dirumuskan sebagai berikut.

Pengembangan model penafsiran yang tidak lagi sentralistik dan formal oleh penguasa/pemerintah sehingga tidak lagi berkesan sebagai alat pembenaran untuk mempertahankan kekuasaan. Model penafsiran perlu dirubah menjadi dapat diteliti/dikaji oleh ragam disiplin ilmu dan ragam komunitas pada tataran nilai-nilai instrumental dan praktisnya

(konsekuensi Pancasila sebagai ideologi-terbuka), ditegakkan melalui perilaku keteladanan oleh segenap bangsa, dan dikontrol melalui penegakkan hukum oleh aparat negara.

Pendekatan untuk memahami, menghayati (internalisasi), dan menerapkannya yang ditawarkan oleh forum adalah pendekatan-kemanusiaan melalui budaya-dialog (tidak lagi semata-mata pendekatan formal kenegaraan); peningkatan kualitas Pusat-pusat Kajian Pancasila; peningkatan kualitas pengelola negara, transformasi kepemimpinan, dan penyempurnaan perundang-undangan; transformasi nilai-nilai Pancasila dengan cara/metode yang terbaru.

Metodenya ditawarkan melalui pendidikan, yaitu dialog-budaya (pembudayaan yang menyatu dengan proses internalisasi), komunikasi, diskusi interaktif, koordinasi, regulasi, dan keteladanan yang disertai dengan penerapan teknik-teknik '*reward and punishment*', simulasi (bermain-peran), dinamika kelompok, analisis-kasus, dan seterusnya tetapi tidak melalui teknik-teknik ceramah indoktrinatif, monolog, menggurui, dan seterusnya. Penerapan metode dan teknik kependidikan ini perlu dipahami dalam arti yang luas, yaitu yang tidak sekedar '*schooling*' tetapi yang lebih penting adalah dalam kerangka pembentukan budi pekerti (akhlak, moral) dan karakter peserta didik.

Sasaran untuk berposisi dan berperan baik sebagai subjek maupun objek untuk implementasi Pancasila adalah individu, keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara dengan prioritas kepada praktisi, ilmuwan/akademisi, ormas/orpol, pemimpin nasional/daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

E. Tindak Lanjut

Untuk menunjang dan mempercepat reaktualisasi nilai-nilai Pancasila menghadapi Indonesia Masa Depan perlu segera dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Merevisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar mengatur Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi para peserta didik dari tingkat pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi.
2. Sosialisasi Pancasila dan UUD 1945 (yang sudah diamandemen), secara berlanjut.
3. Pendidikan Pancasila bukan sebagai alternatif tetapi wajib bagi sekolah dan perguruan tinggi, yang substansi dan orientasinya berbobot pada pendidikan moral, pendidikan budi-pekerti, dan pendidikan karakter untuk mewujudkan kearifan-akademik dan kearifan-sosial yang berkeadaban Indonesia berdasarkan Pancasila.

SIMPULAN

Pembangunan karakter dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran

terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa.

Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, meralisasikan, mengejawantahkan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena bangsa Indonesia memiliki cirri khas tentang dasar Negara, pandangan hidup bangsa, maka pendekatan yang tepat yaitu menggunakan “Pendekatan Pancasila”. Adapun ranah dan sasaran dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah “Pembangunan Karakter”, yang mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotor. Karena termasuk pendidikan karakter, maka diperlukan model dan keteladanan. Uraian tentang reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan yang mencakup semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, yaitu meliputi aspek alamiah dan aspek sosial

Untuk mewujudkan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, diperlukan model, pendekatan, metode, teknik, sasaran (subjek dan objek), dan contoh untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengembangan model penafsiran Pancasila secara terbuka (konsekuensi Pancasila sebagai ideologi-terbuka). Pendekatan untuk memahami, menghayati (internalisasi), dan menerapkannya yang ditawarkan oleh forum adalah pendekatan-kemanusiaan melalui budaya-dialog, peningkatan kualitas Pusat-pusat kajian Pancasila, peningkatan kualitas pengelola negara, transformasi kepemimpinan, dan penyempurnaan perundang-undangan; transformasi nilai-nilai Pancasila dengan cara/metode yang terbaru. Metodenya yaitu dialog-budaya (pembudayaan yang menyatu dengan proses internalisasi), komunikasi, diskusi interaktif, koordinasi, regulasi, dan keteladanan yang disertai dengan penerapan teknik-teknik ‘*reward and punishment*’, simulasi (bermain-peran), dinamika kelompok, analisis-kasus, dan seterusnya. Sasaran untuk berposisi dan berperan baik sebagai subjek maupun objek untuk implementasi Pancasila adalah individu, keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara dengan prioritas kepada praktisi, ilmuwan/akademisi, ormas/orpol, pemimpin nasional/daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chalik A. (1983). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara dan Proses Pembentukannya*. Bandung: Armico.
- Hanapiah, P. (2006). *Aktualisasi Pancasila untuk Persatuan Bangsa*. (Makalah-deseminasi hasil Simselok Pancasila yang diselenggarakan oleh kerjasama Unpad, Lemhannas R.I., dan Pemprov Jabar bagi Mahasiswa STISIP Tasikmalaya pada tanggal 20 Mei 2006 di Kampus STISIP Tasikmalaya). Bandung.

- Kartohadiprojo, Soediman, (1983). *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, cetakan ke-4, Bandung, Penerbit Alumni.
- Kemendiknas. (2011). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No: 267/DIKTI/KEP/2000 *tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia*.
- Lembaga Pertahanan Nasional. (1992). *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Noor Syam, M. (2007). *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional)*, disertasi edisi III, Malang, Laboratorium Pancasila.
- Noor Syam, M. (2007). *Pembudayaan Nilai Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan Ideologi Nasional: (Makalah disajikan Seminar Nasional dalam rangka HUT 40 th Lab. Pancasila, 3 November 2007 di Kampus UM)*.
- Notonagoro,(1984). *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta, PT Bina Aksara,cetakan ke-6.
- (2000). *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional)*, edisi II, Malang Laboratorium Pancasila.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen ke IV Tahun 2002). Surakarta: Penerbit ITA.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: “CV. Nuansa Aulia”

<http://sawali.info/2010/06/01/nilai-nilai-pancasila-riwayatmu/#ixzz0zc5tjhfP>